

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Literatur

2.1.1 Permukiman Kumuh

UN-HABITAT (2007) mendefinisikan permukiman kumuh sebagai permukiman yang berpenghasilan rendah dan memiliki kondisi kehidupan yang buruk. Sehubungan dengan itu, menurut Sari et al (2018), permukiman kumuh pada umumnya diidentifikasi dengan berlebihnya penduduk bermukim di suatu wilayah tanpa menghiraukan asas kelayakan huni. Sadyohutomo (2008) juga menyatakan bahwa sebagian dari permukiman kumuh tersebut dikatakan sebagai permukiman ilegal yang berada pada tanah bukan miliknya, melainkan tanah milik negara atau pemerintah.

Karakteristik yang dapat terlihat pada permukiman kumuh antara lain sangat tingginya kepadatan bangunan dalam luasan yang terbatas, terletak di lahan dengan peruntukan/tata ruang yang tidak seharusnya, sangat rendahnya kualitas bangunan, rawan penyakit lingkungan maupun sosial, tidak terfasilitasnya prasarana lingkungan yang mencukupi, sehingga cenderung membahayakan hidup penduduk yang bermukim (Budiharjo, 2005). Pendapat lain mengenai karakteristik permukiman kumuh adalah kondisi bangunan yang tidak / semi permanen, tidak teratur, tingginya kepadatan bangunan tersebut, sangat terbatasnya prasarana jalan, dan tidak dilengkapi dengan prasarana persampahan, sehingga memiliki citra yang kotor (Avelar et al., 2008).

Permukiman yang layak huni berdasarkan pada Menteri Negara Perumahan Rakyat (2008) didefinisikan dengan lingkungan hunian sekaligus dapat sebagai tempat kegiatan yang mendukung penghidupan dan perikehidupan, dilengkapi dengan penataan sarana, prasarana, dan utilitas umum sesuai dengan tata ruang. Selain itu, permukiman tersebut juga harus dapat menjamin kesehatan serta keamanan yang bermukim. Dengan demikian, diketahui bahwa kekumuhan pada suatu permukiman dapat dihindari apabila pembangunannya menyesuaikan dengan standar yang

berlaku. Standar yang dimaksud dapat menggunakan standar KOTAKU berdasarkan Permen PUPR No. 14 tahun 2018 mengenai Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan melihat kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah dan persampahan, serta proteksi kebakaran.

2.1.2 Program Kampung Deret

Kampung deret dikenal sebagai salah satu program pemerintah daerah DKI Jakarta, yakni pada masa jabatan Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Kebijakan “Bantuan Perbaikan Rumah di Permukiman Kumuh melalui Penataan Kampung” yang tercantum pada Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2013 diketahui memprioritaskan perbaikan fisik lingkungan, yakni perbaikan rumah kumuh menjadi lebih layak dan permanen dengan mempertahankan desain awalnya yang disertai oleh sarana, prasarana, dan utilitas umum, sehingga dapat mencapai ketentuan pembangunan sebuah kawasan perumahan dan permukiman (Pramantha, 2019). Oleh karena itu, Program Kampung Deret dapat dikatakan sebagai program yang menerapkan peremajaan dalam perbaikan permukiman kumuh (Cahyani et al., 2019).

2.1.2.1 Implementasi Program Kampung Deret

Pengimplementasian Program Kampung Deret dilakukan dengan mengombinasikan pendekatan *top-down* dengan *bottom-up* sesuai teori dari Hogwood & Gunn (2004). Menurut Edarsasi (2016), pendekatan *top-down* dilakukan dengan melaksanakan peraturan gubernur yang berisikan segala prosedur maupun petunjuk, bersamaan dengan mensosialisasikan program tersebut ke seluruh masyarakat Kota Jakarta yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan, pendekatan *bottom-up* dilakukan dengan tawar menawar antara masyarakat dengan pemerintah dalam proses pengimplementasian kebijakan kampung deret. Selain itu, proses pembangunan juga dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui warga selaku penerima bantuan.

2.1.2.2 Teknis Pelaksanaan Program Kampung Deret

Dalam penentuan lokasi yang akan diterapkan Program Kampung Deret, tim evaluasi menyurvei kawasan-kawasan kumuh yang memerlukan penataan. Penentuan lokasi juga dapat dilakukan dari pengajuan yang dilakukan oleh warga terkait tempat tinggalnya yang dirasa layak untuk mendapatkan Program Kampung Deret. Setelah tahap tersebut, pengajuan diverifikasi dan diusulkan oleh wali kota DKI Jakarta kepada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta. DPGP DKI Jakarta selanjutnya merekapitulasi untuk mengajukan usulan pengeluaran Surat Keputusan Gubernur ke Gubernur DKI Jakarta (Edarsasi, 2016).

Tahap setelah diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur yang dilakukan oleh tim evaluasi adalah mensosialisasikannya ke tempat-tempat yang direncanakan proyek pembangunan kampung deret ini (Edarsasi, 2016). Terdapat 2 konsep pelaksanaan Program Kampung Deret, yakni Konsep Bedah Rumah (rumah diperbaiki dengan memundurkannya satu meter dari posisi awal) dan Konsep Penataan Kampung (rumah dibangun baru dan ditata dengan lebih komprehensif) (Edarsasi, 2016).

Ketika dimulainya proses pembangunan kampung deret, seluruh warga yang bermukim di sana ada yang melakukan pemindahan sementara, mengontrak rumah, ataupun menumpang di rumah kerabat. Dalam proses pembangunan tersebut, warga dengan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta bersama-sama mengawasi dan terkadang berpartisipasi membantu dengan harapan pembangunan dapat selesai lebih cepat dari waktu yang seharusnya (Edarsasi, 2016).

Program Kampung Deret dilaksanakan dengan mengikuti Panduan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya (2018), seperti:

1. Kembali dibangunnya bangunan yang dilengkapi oleh sarana, prasarana, dan utilitas umum melalui penambahan fungsi ataupun komponen, serta menatanya melalui pengaturan petak bangunan;
2. Jalan ditingkatkan kualitasnya agar lebih tahan lama dan dapat dilalui lebih banyak kendaraan;
3. Drainase ditingkatkan kualitas dan konektivitasnya agar terhubung dengan sistem drainase kota;
4. Meningkatkan jumlah jaringan pipa maupun non pipa dan menginstalasi pengelolaan air minum;
5. Menyediakan sistem sanitasi dan memperbaiki unit pengelolaan air limbah;
6. Membangun komponen serta memperbaiki sarana dan prasarana persampahan; dan
7. Sarana proteksi kebakaran dibangun dan ditingkatkan kualitasnya.

2.1.2.3 Sasaran Program Kampung Deret

Sasaran pada Program Kampung Deret, menurut Peraturan Gubernur No. 64 Tahun 2013 Pasal 5, ditujukan pada masyarakat dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Masyarakat yang bermukim pada kawasan dengan tingginya tingkat kepadatan penduduk maupun bangunan. Hal ini dikarenakan kawasan tersebut dapat menyebabkan mudahnya terjadi kebakaran dan rawan penyakit.
2. Masyarakat yang bermukim di kawasan dengan tata letak bangunan yang tidak teratur. Hal ini dikarenakan kawasan tersebut mengurangi estetika kawasan tersebut dan tidak memaksimalkan penggunaan ruang yang ada.
3. Masyarakat yang bermukim di kawasan dengan konstruksi bangunan yang tidak memenuhi standar. Hal ini dikarenakan bangunan tersebut sangat rentan untuk runtuh.
4. Masyarakat yang bermukim di kawasan kurang ventilasi bangunan. Hal ini dikarenakan kesehatan dan kenyamanan masyarakat di kawasan tersebut dapat terganggu.

5. Masyarakat yang bermukim di kawasan dengan saluran drainase yang kurang berfungsi. Hal ini dikarenakan kawasan mudah tergenang banjir dan rentan menularkan penyakit.
6. Masyarakat yang bermukim di kawasan dengan jamban yang tidak memenuhi standar kebutuhan. Hal ini dikarenakan kawasan tersebut memiliki sanitasi yang rendah dan mampu mencemari lingkungan.

Kelurahan Petogogan RW 05 dijadikan lokasi pelaksanaan Program Kampung Deret karena sudah memenuhi sasaran yang telah diuraikan di atas. Pernyataan tersebut diperoleh dengan melihat kesesuaian rencana perbaikan pada pedoman RP2KPKP yang ditujukan pada perbaikan kampung Kelurahan Petogogan RW 05.

2.1.3 Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Berdasarkan penjelasan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Program Kota Tanpa Kumuh atau KOTAKU berorientasi pada penanggulangan kumuh untuk peningkatan kualitas permukiman agar terhindar dari munculnya kumuh baru. Pembangunan platform kolaborasi beberapa pihak yang berkepentingan antar pemerintah, swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya melalui program yang diinisiasikan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya ini juga merupakan langkah untuk terpenuhinya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, yakni tahun 2019 dengan kota tanpa adanya permukiman kumuh.

Tujuan dari diadakannya Program KOTAKU adalah untuk memperbanyak akses terkait dengan infrastruktur serta beberapa fasilitas pokok yang ada pada permukiman kumuh sekitar perkotaan. Program KOTAKU ini menggunakan acuan standar permukiman kumuh yang telah ada secara tertulis, mengurangi luas kekumuhan suatu permukiman mencapai 0 Ha, menyediakan infrastruktur untuk meningkatkan penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), mendirikan dan menjalankan Pokja PKP kabupaten/kota, terstrukturanya rencana dalam menangani permukiman kumuh yang terintegrasi pada tingkat

kabupaten/kota, dan terwujudnya aturan antar sesama masyarakat untuk pencegahan kumuh dengan hidup sehat dan bersih (Kotaku, 2017).

Indikator KOTAKU, mengutip dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2018) merupakan indikator yang ditetapkan sebagai penentuan kondisi kekumuhan pada suatu kawasan permukiman atau perumahan. Indikator untuk menentukan kekumuhan tersebut dikaji melalui 7 aspek dan 16 kriteria.

2.1.3.1 Kondisi Bangunan Gedung

Kondisi bangunan gedung mencakup:

a) Ketidakteraturan bangunan

Suatu bangunan tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan untuk tata bangunan dalam RDTR dan kualitas dalam RTBL. Kriteria untuk RDTR berhubungan dengan peraturan terkait bentuk, besaran, peletakan, serta tampillah yang dimiliki oleh suatu bangunan dalam zona tertentu. Berikutnya, kriteria untuk RTBL berhubungan dengan peraturan terkait blok lingkungan, kavling, bangunan, tinggi serta elevasi lantai pada bangunan, konsep identitas dan orientasi lingkungan, terakhir adalah wajah jalan.

b) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang

Suatu bangunan dinilai sesuai apabila memiliki nilai KDB dan KLB yang melebihi ketentuan yang terdapat dalam RTBL atau RDTR. Kepadatan bangunan yang tidak lebih dari 250 unit per hektar juga merupakan hal lain yang perlu diperhatikan.

c) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat

Suatu bangunan pada lokasi tertentu tidak dapat memenuhi persyaratan kualitas bangunan apabila pengendalian dampak terhadap lingkungan yang kurang baik, adanya bangunan gedung yang berdiri di atas atau bawah tanah maupun air atau prasarana/sarana umum, berikutnya adalah kesehatan, keselamatan, kenyamanan, serta kemudahan akses yang baik dan jelas ke dalam bangunan gedung.

2.1.3.2 Kondisi Jalan Lingkungan

Kondisi jalan lingkungan mencakup:

- a) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman

Lingkungan perumahan maupun permukiman tidak memiliki akses ke jaringan jalan.

- b) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk

Terdapat kerusakan pada permukaan jalan seperti bentuk yang berubah serta retak.

2.1.3.3 Kondisi Penyediaan Air Minum

Kondisi penyediaan air minum mencakup:

- a) Akses aman air minum tidak tersedia

Air minum yang aman memiliki kualitas yang baik, sehingga air yang memiliki warna, bau, dan berasa dinyatakan tidak baik dan tidak aman.

- b) Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi

Setiap individu harus memenuhi kebutuhan air minum per hari sebanyak 60 liter.

2.1.3.4 Kondisi Drainase Lingkungan

Kondisi drainase lingkungan mencakup:

- a) Drainase lingkungan tidak tersedia

Saluran tidak terhubung ataupun tersedia di suatu permukiman, sehingga drainase tersumbat dan menyebabkan air tergenang dan tidak mengalir.

- b) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan

Apabila saluran mengalami banjir setinggi setidaknya 30 cm selama setidaknya dua jam dan terjadi setahun dua kali.

- c) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

Drainase yang hanya berupa galian tanah tanpa memiliki material yang digunakan sebagai bahan pelapis maupun penutup serta apabila mengalami kerusakan dianggap drainase yang memiliki kualitas tidak baik.

2.1.3.5 Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Kondisi pengelolaan air limbah mencakup:

- a) Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis dan prasarana

Apabila *septic tank* tidak ada pada suatu perumahan baik individual / komunal / terpusat, maka pengelolaan air limbah tidak memiliki sistem yang sesuai persyaratan.

- b) Sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis

Apabila *septic tank* tidak terhubung dengan kloset pada suatu perumahan baik individual / komunal / terpusat, maka pengelolaan air limbah tidak memiliki sarana yang sesuai persyaratan.

2.1.3.6 Kondisi Pengelolaan Persampahan

Kondisi pengelolaan persampahan mencakup:

- a) Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis

Lingkungan perumahan tidak memiliki tempat pengumpulan sampah (TPS), TPS3R, atau TPS terpadu. Selain itu, adanya sarana untuk pengangkutan sampah pada skala lingkungan.

- b) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis

Dalam suatu lingkungan perumahan tidak melakukan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan serta pengolahan sampah lingkungan.

2.1.3.7 Kondisi Pengaman (Proteksi) Kebakaran

Kondisi pengaman (proteksi) kebakaran mencakup:

- a) Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia

Tidak tersedianya pasokan air (alam / buatan) dan akses berupa jalan lingkungan untuk kendaraan pemadam kebakaran. Selain itu, adanya sarana untuk pemberitaan terjadi kebakaran.

- b) Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia

Tidak tersedianya kendaraan pemadam kebakaran ataupun mobil tangga. Selain itu, juga tidak adanya Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Dalam penelitian ini, 7 aspek yang telah disebutkan akan dianggap sebagai variabel. Kemudian, 16 kriteria yang merupakan akumulasi pada masing-masing aspek akan dianggap sebagai indikator.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ditujukan untuk menjadi referensi dasar saat melaksanakan suatu penelitian. Hal ini karena penelitian terdahulu berfungsi agar dapat memperdalam teori yang digunakan. Selain itu, penelitian terdahulu juga digunakan sebagai pembandingan dan acuan agar membuktikan keorisinalan penelitian serta menghindari adanya kesamaan dengan penelitian ini. Dari penjelasan ini, maka penelitian terdahulu berdasarkan jangka waktu 5 tahun terakhir yang dicantumkan seputar Program Kampung Deret dan KOTAKU dituangkan ke dalam bentuk tabel sebagai berikut:



Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti / Judul	Rumusan Masalah	Tujuan	Variabel	Metode	Hasil
1	Alfian Nurdiansyah / <i>Urban Slum Upgrading Policy in Jakarta (Case Study: Kampung Deret Program Implementation)</i>	Bagaimana implementasi kebijakan membentuk rancangan perubahan, apakah efektif atau tidak dalam mencapai tujuan kebijakan?	Menjelaskan efektivitas Program Kampung Deret dan menganalisis strategi alternatif untuk implementasi kebijakan Program Kampung Deret yang efektif.	1. Unit Perumahan - Material - Desain & Fitur 2. Infrastruktur - Drainase dan Kali - Penerangan Jalan - Listrik - Air Bersih - Hidran - Persampahan 3. Kepemilikan Hak Atas	Metode kuantitatif dengan menerapkan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.	1. Terdapat kesulitan teknis yang dihadapi otoritas selama pengimplementasian Program Kampung Deret. 2. Program Kampung Deret di Petogogan relatif berhasil dalam hal pemasangan tempat tinggal, sarana prasarana, dan jaminan kepemilikan. 3. Program Kampung Deret dianggap

No.	Nama Peneliti / Judul	Rumusan Masalah	Tujuan	Variabel	Metode	Hasil
				Tanah dan Properti 4. Fasilitas Publik - Masjid - RTH - Sekolah dan Fasilitas Kesehatan		efektif untuk dijadikan kebijakan perbaikan permukiman kumuh yang dapat meminimalkan resistensi serta memaksimalkan partisipasi penghuni.
2	Harri A Setiadi dan Arip Pauzi Rahman / Analisa Keberhasilan Program Kampung Deret Petogogan	Bagaimana variasi tingkat total kepuasan masyarakat yang memperoleh manfaat program KDP?	Mendeskripsikan tingkat kepuasan masyarakat yang memperoleh manfaat program KDP dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi	1. Dimensi Kenyamanan Fisik Rumah 2. Dimensi Atribut Rumah	Metode kuantitatif melalui pengukuran tingkat keberhasilan program dari	1. Program KDP tergolong sukses melalui analisis tingkat kepuasan responden. 2. Tingkat kepuasan responden rata-rata "Memuaskan"

No.	Nama Peneliti / Judul	Rumusan Masalah	Tujuan	Variabel	Metode	Hasil
	Menggunakan Pendekatan Evaluasi Pasca Huni		kontributor utama kepuasan terhadap program KDP.	3. Dimensi Kualitas Infrastruktur 4. Dimensi Kualitas Teknologi	tingkat kepuasan masyarakat	berdasarkan dari 4 dimensi tersebut.
3	Rahmatyas Aditantri dan Rona Fika Jamila / Program Perbaikan Kampung Di Kampung Deret Petogogan, Jakarta Selatan	Bagaimana dampak dari adanya program perbaikan kampung di Petogogan?	Dampak lingkungan permukiman Kampung Deret Petogogan oleh Program Perbaikan Kampung	1. Aspek Fisik 2. Aspek Lingkungan 3. Aspek Sosial	Metode kualitatif dengan mendeskripsikan data yang terkumpul di lapangan.	Kampung Deret Petogogan memiliki lingkungan yang lebih rapi dengan kualitas yang baik pasca perbaikan.
4	Raudina Qisthi Pramantha /	Bagaimana prosedur rencana	Mendapatkan faktor-faktor yang	1. Keterlibatan Warga	Metode kualitatif dengan	1. Faktor prosedur perencanaan

No.	Nama Peneliti / Judul	Rumusan Masalah	Tujuan	Variabel	Metode	Hasil
	Proses Perencanaan Kampung Deret Petogogan Dengan Metode Peremajaan Dan Teknologi Risha (Rumah Instant Sederhana Sehat) Berdasarkan Pendekatan Gabungan Top-Down Dan Partisipasi Warga Di Kelurahan	Kampung Deret Petogogan yang penerapannya menggunakan teknologi RISHA dan peremajaan ?	mempengaruhi penggunaan teknologi RISHA dalam peremajaan kampung deret.	2. Kepercayaan 3. Komunikasi 4. Kontrol Pemerintah	pendekatan induktif.	tersebut dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, komunikasi, kepercayaan, dan kontrol pemerintah. 2. Pelaksanaan diketahui masih mencukupi hanya kebutuhan dasar minimal suatu rumah dan belum mencapai standar rumah sederhana sehat dan tata cara dalam merencanakan

No.	Nama Peneliti / Judul	Rumusan Masalah	Tujuan	Variabel	Metode	Hasil
	Petogogan, Kota Jakarta Selatan					lingkungan suatu perumahan.
5	Pratiwi Aulia Kertisaputri / Pengelolaan Infrastruktur Permukiman Di Kampung Deret Kelurahan Petogogan Jakarta Selatan	Bagaimana keterlibatan warga dalam pengelolaan infrastruktur Kampung Deret Petogogan?	Mengetahui upaya yang dilakukan dalam pengelolaan infrastruktur Kampung Deret Petogogan	1. Program penataan kampung 2. Infrastruktur (Jalan Lingkungan, Air Bersih, Sistem Drainase, Pengelolaan Persampahan, Distribusi Listrik, dan Ruang	Metode kuantitatif dengan menggunakan penjelasan yang terukur secara numerik yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik ataupun diagram.	1. Tidak seluruh komponen infrastruktur permukiman memiliki kondisi yang baik. 2. Kondisi permukiman yang lebih baik dengan susunan rumah berderet tidak menjadikan masyarakat memiliki inisiatif untuk dapat terlibat

No.	Nama Peneliti / Judul	Rumusan Masalah	Tujuan	Variabel	Metode	Hasil
				Terbuka Hijau) 3. Keterlibatan Masyarakat		dalam melakukan upaya-upaya pengelolaan infrastruktur permukiman secara optimal. 3. Bentuk pengawasan yang dilakukan hanya berupa peringatan atau teguran secara lisan dan belum ada sanksi tegas yang diberikan jika terjadi pelanggaran dalam pengelolaan infrastruktur.

No.	Nama Peneliti / Judul	Rumusan Masalah	Tujuan	Variabel	Metode	Hasil
6	Bella Prita Cahyani, Deni Agus Setyono, dan Wulan Dwi Purnamasari / Hubungan Tingkat Penerimaan Masyarakat dengan Tingkat Livability Permukiman Kampung Deret Petogogan dan Kampung Deret Kapuk	Bagaimana korelasi antara tingkat <i>livability</i> dengan tingkat penerimaan program Kampung Deret?	Mengidentifikasi korelasi antara tingkat <i>livability</i> permukiman Kampung Deret Petogogan dan Kapuk dengan tingkat penerimaan Program Kampung Deret	1. Manfaat 2. Kemudahan 3. Keinginan 4. Fisik kawasan 5. Kualitas Lingkungan 6. Transportasi-Aksesibilitas 7. Fasilitas 8. Utilitas 9. Ekonomi 10. Sosial 11. Tingkat <i>Livability</i> 12. Tingkat Penerimaan	Metode deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan tingkat penerimaan masyarakat dan <i>livability</i> permukiman.	1. Masyarakat setuju untuk diperbaiki permukimannya dengan program Kampung Deret. 2. Korelasi lemah antara tingkat <i>livability</i> dengan tingkat penerimaan di Kampung Deret Petogogan.
7	Vian Frisca Aisyahwati /	1. Bagaimana pelaksanaan	Menjelaskan analisis dari	Indikator KOTAKU	Metode kualitatif dengan	1. Pelaksanaan program KOTAKU

No.	Nama Peneliti / Judul	Rumusan Masalah	Tujuan	Variabel	Metode	Hasil
	Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Upaya Penanganan Kawasan Kumuh (Studi pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang)	Program Kota Tanpa Kumuh dalam menangani kekumuhan? 2. Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan program?	Pelaksanaan program KOTAKU dalam menangani kekumuhan beserta faktor penghambatnya.		observasi, wawancara, dan dokumentasi.	terlaksana dengan baik sesuai dengan indikator KOTAKU. 2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan yaitu kurangnya kesadaran warga dalam menjaga lingkungan agar terhindar dari kekumuhan.

No.	Nama Peneliti / Judul	Rumusan Masalah	Tujuan	Variabel	Metode	Hasil
8	Agatha Christy Permata Sari, Agus Suman, dan David Kaluge / Analisis Implementasi Pembangunan Partisipatif Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Studi Komparatif: Desa Bligo, Kecamatan Candi dan Desa	Apakah yang mempengaruhi perbedaan progres pembangunan antara Desa Jiken dan Desa Bligo?	Mengungkapkan faktor-faktor pengaruh perbedaan progres di Desa Jiken dan Desa Bligo.	1. Aspek Fisik 2. Aspek Lingkungan 3. Aspek Sosial	Pendekatan deskriptif - kualitatif dengan melakukan analisis secara intensif, komunikatif dan melakukan observasi secara langsung ke 2 desa tersebut.	Keterlibatan warga cukup berperan penting agar tercipta pembangunan berkelanjutan oleh warga secara mandiri (tidak hanya berupa pembangunan fisik saja).

No.	Nama Peneliti / Judul	Rumusan Masalah	Tujuan	Variabel	Metode	Hasil
	Jiken, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur					
9	Nurhasanah / Implementasi Kebijakan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan kebijakan program dalam menyejahterakan warga Kelurahan Merjosari? 2. Apa saja faktor pendukung dan faktor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi penerapan kebijakan program dalam menyejahterakan warga. 2. Identifikasi faktor pendukung dan penghambat yang di hadapi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isi Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> - Kepentingan yang mempengaruhi - Perubahan yang ingin dicapai - Letak pengambilan keputusan - Pelaksana Program 	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan dilaksanakan dalam 4 tahap yaitu tahap perencanaan, survei lokasi, pendanaan, dan pelaksana. 2. Faktor penghambat berasal dari warga yang kurang menjaga proyek yang telah dilaksanakan.

No.	Nama Peneliti / Judul	Rumusan Masalah	Tujuan	Variabel	Metode	Hasil
		penghambat yang dihadapi?		<ul style="list-style-type: none"> - Sumber daya yang digunakan 2. Lingkungan Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> - Kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat - Karakteristik Lembaga berkuasa - Tingkat kepatuhan dan adanya respons dari pelaksana 		Kemudian, faktor pendukung berasal dari warga yang tetap ikut serta dalam pelaksanaan program, menyumbangkan dana, dan bahan-bahan bangunan.

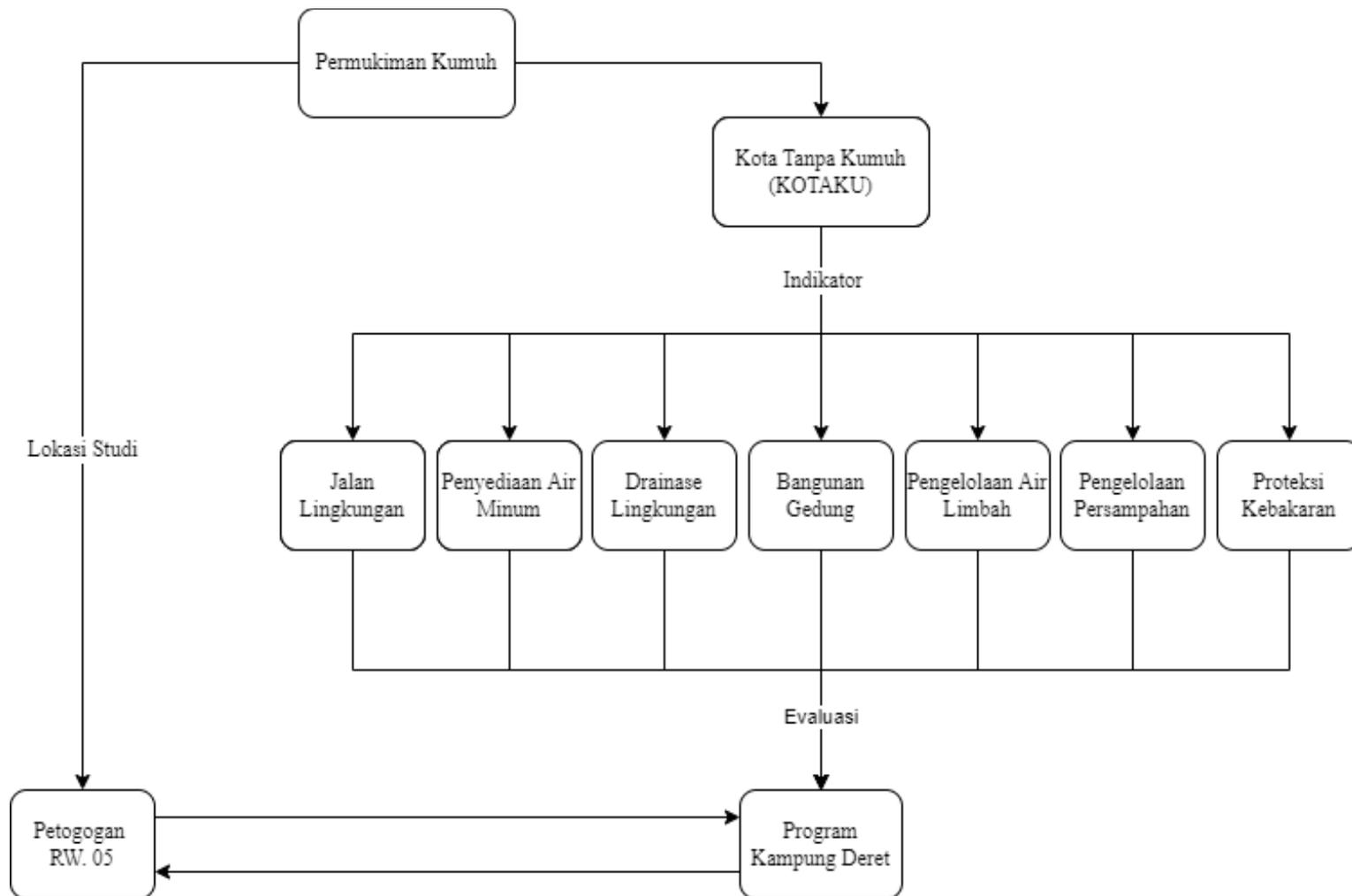
No.	Nama Peneliti / Judul	Rumusan Masalah	Tujuan	Variabel	Metode	Hasil
10	Ahsanul Kholqi dan Dr. Laila Kholid Alfirdaus, S.IP, M.PP / Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Karangwaru)	Bagaimana program Kota Tanpa Kumuh yang diterapkan di Kelurahan Karangwaru berdasarkan perspektif pemberdayaan masyarakat?	Menjelaskan Program Kota Tanpa Kumuh sebagai proses pemberdayaan masyarakat.	Aspek Sosial	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Program belum sempurna karena adanya kekurangan dalam pelaksanaan, yakni terbatasnya dana sehingga menghambat pengerjaan dan dalam proses pemberdayaannya pasca pembangunan infrastruktur perlahan partisipasi masyarakat berkurang.

2.3 Sintesa Kajian Pustaka

Sintesa kajian pustaka merupakan alur keterhubungan dari setiap kajian literatur yang telah dipaparkan. Dari kajian literatur yang digunakan, pemukiman kumuh merupakan masalah utama yang difokuskan dalam perumusan indikator KOTAKU yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR. Indikator KOTAKU terdiri atas tujuh aspek, yaitu Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan, Bangunan Gedung, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Persampahan, dan Proteksi Kebakaran.

KOTAKU bertujuan untuk mengurangi kekumuhan di ibu kota dan Program Kampung Deret merupakan salah satu program yang memiliki tujuan yang sangat mendukung tercapainya Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Dengan demikian, pada penelitian ini pengimplementasian Program Kampung Deret akan ditinjau dari tujuh aspek berbeda indikator KOTAKU.

Untuk melaksanakan penelitian ini, ditentukan satu lokasi yang akan dijadikan studi kasus yakni Petogogan RW 05. Lokasi ini pada awalnya merupakan permukiman kumuh yang selanjutnya mendapatkan penanganan Program Kampung Deret. Berikut adalah diagram sintesa kajian pustaka.



Gambar 2 Diagram Sintesa Kajian Pustaka